

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial hidup berkelompok dan saling membantu satu sama lain. manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain, salah satunya adalah pinjam meminjam uang untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhannya, hampir semua orang pernah merasakan memiliki hutang atau memberi pinjaman kepada orang lain. Namun dalam mengembalikan pinjaman tidak tepat waktu seperti yang pernah diperjanjikan pada saat menerima pinjaman. Bahkan dalam meminta kembali uang dipinjam terkadang pemberi pinjaman menempuh jalur hukum, hal ini dikarenakan penerima pinjaman selalu memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati, maka muncul sengketa perdata hutang piutang.

Dalam sengketa perdata ada 2 (dua) penyelesaian, yaitu secara *litigasi* dan *non litigasi*. Penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yaitu dengan melalui lembaga peradilan, sedangkan penyelesaian dengan cara *non litigasi* adalah penyelesaian dengan cara musyawarah. D.Y. Witanto memberikan pengertian, sengketa hukum adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang menimbulkan/mempunyai akibat hukum. Sengketa hukum karena ada

pelanggaran terhadap aturan hukum positif atau karena munculnya benturan antara hak dan kewajiban seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum positif. Sengketa dapat diselesaikan dengan melalui *litigasi* dan *non litigasi*, penyelesaian dengan cara litigasi yaitu penyelesaian melalui lembaga peradilan, dengan cara pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara *non litigasi*, yang salah satunya yaitu penyelesaian dengan cara mediasi (musyawarah) atau penyelesaian diluar pengadilan.<sup>1</sup>

Pengertian mediasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya ditulis Perma Nomor 1 Tahun 2016) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian dengan cara mediasi merupakan penyelesaian berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengan cara mediasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian *win-win solution*, dalam penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, para pihak yang bersengketa menjadi pemenang, karena penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian.

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 4.

Berdasarkan pengertian mediasi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, seperti waktu penyelesaian yang relatif sangat singkat, tidak memerlukan biaya yang mahal dan tidak menguras tenaga dan pikiran, namun yang paling utama adalah hubungan sebagai masyarakat antara para pihak tetap terjaga dengan baik. Penyelesaian dengan jalan mediasi menunjukkan penyelesaian melalui Pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan, selain biaya, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai hambatan dan kendala yang muncul dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian dengan cara mediasi juga dapat dikatakan sebagai penyelesaian dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan beberapa cara atau prosedur guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dapat memberikan hasil lebih optimal, maka Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan perwujudan dari Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Meskipun penyelesaian sengketa dengan cara mediasi merupakan penyelesaian *win-win solution*, dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun tidak semua pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan mediasi selalu ada, dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri pada umumnya selalu gagal, para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara melalui persidangan, namun juga tidak sedikit penyelesaian sengketa perdata yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Apabila dicermati penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi banyak keuntungan yang akan didapat oleh para pihak, seperti waktu penyelesaian yang relatif singkat, tidak membutuhkan biaya dan dapat menghemat tenaga. Namun, dalam praktik di lapangan, kendala dan hambatan masih muncul, sehingga menyebabkan mediasi menjadi gagal.

Pengadilan Negeri Kudus penyelesaian sengketa yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 hanya satu yaitu perkara nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Kds, dalam perkara tersebut menyangkut masalah wanprestasi, dimana Tergugat masih mempunyai pinjaman yang belum dilunasi pada Penggugat yang telah lewat jatuh tempo belum di bayar oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kudus.

Dalam gugatan wanprestasi perkara nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Kds, pada pokoknya Tergugat masih mempunyai hutang (biaya sewa armada *dump truck*) dan material bangunan pada Penggugat. Tergugat selalu memberi janji-janji yang tidak pernah ditepati, sehingga Penggugat merasa dipermainkan oleh Tergugat,



oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Kudus. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Bagaimana akibat hukumnya setelah penyelesaian wanprestasi dengan cara mediasi berhasil ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya setelah penyelesaian wanprestasi dengan cara mediasi berhasil.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis nantinya dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini nantinya mampu memberikan masukan kontribusi, informasi dan wawasan bagi masyarakat, mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan antara satu sama lain, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab satu ini akan membahas mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas mengenai Tinjauan, Umum Tentang Mediasi, Pengertian Mediasi, Ruang Lingkup Mediasi, Tujuan Mediasi, Laporan Mediator dari Hasil Mediasi, Tahapan Dalam Proses Mediasi,

Tinjauan Umum Tentang Mediator, Pengertian Mediator dan Tahapan Tugas Mediator.

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang penyelesaian wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kudus dan akibat hukumnya setelah penyelesaian wanprestasi dengan cara mediasi berhasil.

Bab V Penutup, bab ini akan membahas Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran